

KOLABORASI ANTARA PEMERINTAH KALURAHAN TEPUS DAN DINAS PARIWISATA DALAM MENCAPAI INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKTOR PARIWISATA

Endro Widayanto¹, Supardal²

¹Dinas Pariwisata Gunungkidul, ²Magister Ilmu Pemerintahan STPM "APMD"

Email : endrowida@gmail.com, gusdal66@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kolaborasi antara Pemerintah Kalurahan Tepus dan Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dalam upaya pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sektor pariwisata, khususnya terkait dengan peningkatan kunjungan wisatawan dan belanja wisatawan. Kolaborasi ini tercermin dalam dua bentuk utama: pengelolaan Tempat Penarikan Retribusi (TPR) dan pengembangan Desa Wisata Tepus. Melalui mekanisme bagi hasil pada retribusi, Kalurahan Tepus berperan aktif dalam pengelolaan pos retribusi yang beroperasi selama 24 jam, yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli kalurahan dan menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Selain itu, Dinas Pariwisata turut mendukung pengembangan Desa Wisata Tepus dengan memberikan fasilitasi infrastruktur, pelatihan, dan promosi guna memperluas daya tarik wisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis proses kolaborasi antara kedua pihak berdasarkan konsep *collaborative governance* yang mencakup dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan pemahaman bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi ini tidak hanya berfokus pada peningkatan angka kunjungan wisatawan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat melalui peningkatan pendapatan dan peluang usaha. Kolaborasi ini juga menjadi model pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Diharapkan temuan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk pengembangan sektor pariwisata di daerah lain dengan potensi serupa.

Kata kunci: *Kolaborasi, Pemerintah Kalurahan Tepus, Dinas Pariwisata, Indikator Kinerja Utama, Pariwisata Berkelanjutan.*

ABSTRACT

This study examines the collaboration between the Government of Tepus Village and the Tourism Office of Gunungkidul Regency in achieving the Key Performance Indicators (KPIs) of the tourism sector, particularly related to the increase in tourist visits and tourist spending. This collaboration is reflected in two main areas: the management of the Tourism Retribution Collection Point (TPR) and the development of Tepus Tourism Village. Through a revenue-sharing mechanism on the retribution, Tepus Village plays an active role in managing the retribution post, which operates 24 hours a day, contributing to the increase in the village's local revenue and creating economic opportunities for the local community. Additionally, the Tourism Office supports the development of Tepus Tourism Village by providing infrastructure facilitation, training, and promotion to expand its tourist attraction. This research uses a qualitative approach with a case study method to analyze the collaboration process between the two parties based on the concept of collaborative governance, which includes face-to-face dialogue, trust building, commitment to the process, and shared understanding. The results show that this collaboration focuses not only on increasing tourist visits but also on providing positive impacts on the improvement of local community welfare through increased income and business opportunities. This collaboration also serves as a model for community-based

tourism management that is inclusive, efficient, and sustainable. It is hoped that the findings of this study can serve as a reference for the development of the tourism sector in other regions with similar potential.

Keywords: *Collaboration, Government of Tepus Village, Tourism Office, Key Performance Indicators, Sustainable Tourism.*

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata telah tumbuh dan berkembang menjadi salah satu pilar strategis dalam mendorong pembangunan daerah di Indonesia. Dalam konteks pembangunan saat ini, desa atau kalurahan tidak lagi hanya diposisikan sebagai objek, melainkan sebagai subjek aktif yang didorong untuk mengoptimalkan berbagai potensi lokal yang dimilikinya. Pariwisata desa, dengan demikian, memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat mengakselerasi pembangunan ekonomi di tingkat lokal, menjadi sarana pelestarian budaya, serta memperkuat identitas dan kohesi sosial komunitas. Menurut kerangka teori pembangunan lokal, pengembangan pariwisata yang berbasis pada potensi desa mampu memperkuat ekonomi berbasis komunitas melalui penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan masyarakat secara langsung, serta percepatan pembangunan infrastruktur penunjang (Fatimah & Ayu, 2020; Utami, 2023; Wilil & Aedah, 2022).

Salah satu model implementasi yang paling populer dari pendekatan ini adalah konsep desa wisata, yang merupakan wujud nyata dari pariwisata berbasis masyarakat atau *Community-Based Tourism* (CBT). Pendekatan CBT, yang telah berkembang secara signifikan sejak tahun 1980-an, menekankan pada pentingnya keterlibatan aktif dari masyarakat lokal dalam setiap aspek perencanaan, pengelolaan, dan pengambilan manfaat dari kegiatan pariwisata di wilayah mereka. Sebagaimana dijabarkan oleh Nuryanti, konsep desa wisata secara ideal menawarkan sebuah pengalaman wisata yang berbasis pada kehidupan dan budaya lokal (*experience-based*), di mana tujuan utamanya adalah untuk memberdayakan masyarakat setempat secara ekonomi dan sosial, bukan sekadar menjadikan mereka sebagai penonton dalam pembangunan di wilayahnya sendiri (Candranegara et al., 2022; Sado & Sahdan, 2025; Suranto et al., 2019).

Di sisi lain, sebagai sebuah institusi pemerintah, Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul memiliki kewajiban formal untuk memenuhi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. IKU berfungsi sebagai sebuah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebuah organisasi perangkat daerah (Bandiyono, 2021; Dewi et al., 2020). Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 356/KPTS/2021, sasaran utama dari Dinas Pariwisata adalah meningkatnya daya saing pariwisata daerah. Keberhasilan dalam mencapai sasaran ini diukur melalui dua indikator yang sangat spesifik, yaitu jumlah total kunjungan wisatawan dan total belanja yang dikeluarkan oleh wisatawan selama mereka berkunjung ke destinasi-destinasi di Gunungkidul.

Untuk dapat mencapai target IKU yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Pariwisata tentu tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan adanya sebuah kolaborasi yang erat dan sinergis dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk di antaranya adalah pemerintah di tingkat kalurahan yang memiliki destinasi pariwisata unggulan. Dalam konteks ini, Kalurahan Tepus memegang peranan yang sangat strategis. Wilayah ini merupakan rumah bagi berbagai pantai unggulan yang menjadi ikon pariwisata Gunungkidul, seperti Pantai Pulangsyawal (Indrayanti), Pantai Watulawang, dan Pantai Sundak. Selain itu, di wilayah ini juga terdapat Desa Wisata Tepus yang menjadi daya tarik tambahan. Keterkaitan antara Kalurahan Tepus

dengan Dinas Pariwisata menjadi semakin erat karena Pos Penarikan Retribusi resmi berada di wilayahnya.

Kondisi ini menciptakan sebuah dinamika yang menarik, di mana terdapat pertemuan antara kepentingan yang bersifat *top-down* dari pemerintah kabupaten (pencapaian IKU) dengan pendekatan pembangunan yang bersifat *bottom-up* dari tingkat desa (pemberdayaan masyarakat melalui CBT). Secara ideal, kedua kepentingan ini seharusnya dapat berjalan selaras dan saling menguatkan. Kolaborasi yang efektif antara Pemerintah Kalurahan Tepus dengan Dinas Pariwisata akan memungkinkan adanya sinergi sumber daya, penyusunan program promosi yang lebih terarah, serta penguatan kapasitas kelembagaan desa. Dengan demikian, peningkatan jumlah kunjungan dan belanja wisatawan akan secara langsung memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat lokal (Akbar et al., 2021; Muzdalifa & Afifudin, 2023; Pangarso et al., 2021).

Meskipun demikian, terdapat sebuah potensi kesenjangan yang perlu diwaspadai dalam hubungan kolaboratif ini. Terdapat sebuah risiko di mana orientasi yang terlalu kuat pada pencapaian target IKU yang bersifat kuantitatif (jumlah wisatawan dan belanja) dapat mengesampingkan esensi dari pembangunan pariwisata berbasis masyarakat yang bersifat kualitatif. Kesenjangan ini muncul ketika kalurahan hanya diposisikan sebagai sebuah instrumen untuk mencapai target dinas, tanpa adanya pemberdayaan yang sungguh-sungguh. Terdapat kekhawatiran bahwa manfaat yang diterima oleh Kalurahan Tepus hanya akan bersifat semu, sementara prinsip-prinsip pembangunan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan justru terabaikan. Kualitas dari proses kolaborasi inilah yang menjadi kunci (Sukarno et al., 2023; Yusuf et al., 2021).

Untuk dapat menganalisis kualitas dari hubungan kolaboratif tersebut, maka diperlukan sebuah kerangka kerja teoretis yang relevan. Nilai kebaruan atau inovasi dari penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan *Collaborative Governance* yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2008) untuk membedah secara mendalam proses kerja sama yang terjalin. Pendekatan ini tidak hanya melihat apakah kolaborasi terjadi, tetapi juga bagaimana prosesnya berlangsung. Penelitian ini secara spesifik akan mengkaji empat aspek kunci dari proses kolaborasi tersebut, yaitu adanya dialog tatap muka (*face to face*), proses pembangunan kepercayaan (*trust building*), adanya komitmen terhadap proses (*commitment to process*), serta terbangunnya pemahaman bersama (*shared understanding*).

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam bagaimana proses kolaborasi antara Pemerintah Kalurahan Tepus dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam upaya mencapai Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata. Dengan menggunakan kerangka *Collaborative Governance*, penelitian ini akan menggali informasi mendalam mengenai dinamika, tantangan, serta faktor-faktor keberhasilan dari kolaborasi yang telah dilaksanakan. Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah tersusunnya sebuah analisis yang kritis mengenai apakah kolaborasi yang ada telah berjalan secara sinergis dan memberikan manfaat yang nyata bagi pembangunan di Kalurahan Tepus, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai kolaborasi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus(8). Fokus utama dari penelitian ini terletak pada analisis terhadap dokumen-dokumen resmi dan literatur yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri secara mendalam konteks kebijakan dan dinamika kerja sama antar tingkat pemerintahan tanpa bergantung pada

teknik pengumpulan data lapangan. Dengan studi kasus sebagai kerangka, penelitian ini menekankan pada pemahaman kontekstual terhadap fenomena kolaborasi di wilayah tertentu.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah dokumen kebijakan seperti peraturan daerah, Peraturan Bupati, serta laporan-laporan resmi yang mencerminkan proses perencanaan dan pelaksanaan program bersama. Selain itu, kajian akademik dan jurnal ilmiah yang membahas praktik kolaborasi di tingkat lokal juga menjadi sumber penting dalam membangun landasan konseptual. Melalui telaah dokumen tersebut, peneliti dapat mengungkap pola relasi, kerangka kelembagaan, serta berbagai hambatan dan peluang dalam mewujudkan sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah.

Untuk menganalisis data yang diperoleh, pendekatan analisis isi (*content analysis*) digunakan sebagai metode utama. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi secara sistematis isi dokumen berdasarkan tema, struktur, serta pola relasi antar unsur kebijakan. Dengan demikian, peneliti dapat mengidentifikasi peran masing-masing aktor, bentuk koordinasi yang terjadi, serta kecenderungan umum dalam pelaksanaan kolaborasi. Analisis isi memberikan dasar yang kuat untuk memahami realitas kolaboratif secara komprehensif melalui data tekstual tanpa memerlukan keterlibatan langsung dari informan lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Profil Kalurahan Tepus dalam Konteks Kepariwisataan.

Kalurahan Tepus terletak di wilayah Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah ini berada di kawasan perbukitan karst Pegunungan Seribu dengan luas wilayah mencapai 2.852,22 hektare. Batas-batas wilayah Kalurahan Tepus adalah sebagai berikut:

- a) **Utara:** Kalurahan Sidoharjo dan Kalurahan Sumberwungu
- b) **Timur:** Kalurahan Purwodadi
- c) **Selatan:** Samudera Hindia
- d) **Barat:** Kalurahan Sidoharjo

Secara administratif, Kalurahan Tepus terdiri dari 20 padukuhan, 20 Rukun Warga (RW), dan 89 Rukun Tetangga (RT). Beberapa padukuhan di antaranya adalah Gembuk, Tegalweru, Trosari I dan II, Blekonang I–III, Tepus I–III, Jeruk, Singkil, Ngasem, Klumpit, Walangan, dan Kanigoro. Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Kalurahan Tepus adalah 9.109 jiwa, dengan rincian 4.462 laki-laki dan 4.647 perempuan.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kalurahan Tepus Berdasarkan Jenis Kelamin (2020)

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	4.462
2	Perempuan	4.647
Jumlah Total		9.109

Sumber/ *Source:* BPS Kabuten Gunungkidul

Kalurahan Tepus memiliki potensi wisata alam dan budaya yang signifikan. Salah satu inisiatif yang dikembangkan adalah "Dewi Kampus" (Desa Wisata Kalurahan Madani Tepus), yang menawarkan paket wisata berbasis budaya dan alam. Atraksi budaya seperti seni Jatilan, tari, karawitan, dan seni Reog dikemas dalam Festival Kesenian Tepus Yogyakarta (FKTY) yang digelar setiap tahun. Selain itu, letak geografis yang berbatasan dengan Pantai Selatan memungkinkan pengembangan wisata pantai, termasuk wisata "Pantai Perawan" yang dapat dijelajahi menggunakan moda transportasi Jeep. Desa Wisata Tepus mencatatkan prestasi gemilang pada ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022 yang diselenggarakan

oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan berhasil meraih Juara 2 Nasional dalam kategori Suvenir. Keberhasilan ini tidak lepas dari produk-produk unggulan yang dihasilkan oleh lebih dari 100 pengrajin lokal, khususnya dalam bidang kerajinan perak dan tembaga. Produk-produk tersebut bahkan telah dipasarkan hingga ke showroom perak di Yogyakarta, menunjukkan kualitas dan daya saing yang tinggi.

Selain itu, Desa Wisata Tepus juga berhasil masuk dalam daftar 50 besar desa wisata terbaik tingkat nasional pada ajang yang sama. Capaian ini didukung oleh optimalisasi potensi lokal seperti Kampung Bonsai, kegiatan wisata edukatif dalam bidang kerajinan, serta pertunjukan seni tradisional yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Keunikan dan kekayaan budaya lokal menjadi nilai tambah yang membedakan Tepus dari desa wisata lainnya. Tak hanya unggul dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, Desa Wisata Tepus juga memperoleh penghargaan sebagai Desa Wisata Tangguh Bencana tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta pada peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) tahun 2024. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan inovasi desa dalam program mitigasi dan penanggulangan bencana, serta diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur DIY, Pakualam X. Prestasi ini menunjukkan bahwa Desa Wisata Tepus tidak hanya berdaya saing dari segi pariwisata, tetapi juga tangguh dan siap dalam menghadapi risiko bencana.

Bentuk Kolaborasi Dinas Pariwisata dan Kalurahan Tepus

Pengembangan Kolaboratif di Kalurahan Tepus dapat di Gambarkan melalui 2 (dua) temuan utama dilapangan yang dapat dibedakan menjadi hubungan Dinas Pariwisata dengan Kalurahan Tepus, dan Hubungan Dinas Pariwisata dengan Lembaga Pariwisata Kalurahan Tepus (Desa Wisata dan Kelompok Sadar Wisata), dengan temuan sebagai berikut:

a). Kolaborasi dalam Pengelolaan Tempat Penarikan Retribusi (TPR) Pariwisata Tepus.

Hubungan antara Dinas Pariwisata dan Kalurahan Tepus dalam konteks pengelolaan kepariwisataan terwujud melalui kerja sama strategis dalam pengelolaan Pos Retribusi Pariwisata. Sebagaimana diketahui, pengelolaan pos retribusi wisata ini secara umum merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, dalam hal ini melalui Dinas Pariwisata. Namun, karena adanya keterbatasan jumlah sumber daya manusia di lingkungan Dinas Pariwisata, terutama untuk pengawasan dan pengelolaan pos retribusi selama 24 jam penuh, maka Pemerintah Daerah mengambil langkah kolaboratif dengan melibatkan pemerintah kalurahan. Kalurahan Tepus ditugaskan secara resmi oleh Bupati Gunungkidul untuk melaksanakan pemungutan retribusi pada malam hari di Pos Retribusi Kawasan Wisata Pantai Baron hingga Pantai Watulawang. Penugasan ini diatur secara jelas dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 317/KPTS/2024 tentang Penugasan Kepada Pemerintah Kalurahan Untuk Melaksanakan Pemungutan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga, serta Perhitungan Persentase Bagian Dari Hasil Penugasan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga Kepada Pemerintah Kalurahan Pelaksana Pemungutan Tahun Anggaran 2025.

Dalam peraturan tersebut, Kalurahan Tepus diberi tanggung jawab untuk mengelola TPR (Tempat Pemungutan Retribusi) Tepus, yang mencakup kawasan wisata dari Pantai Baron hingga Pantai Watulawang. Adapun operasional petugas pos retribusi dari kalurahan dimulai pada pukul 15.30 WIB hingga pukul 07.30 WIB keesokan harinya. Hal ini memungkinkan pelayanan retribusi berjalan selama 24 jam, meskipun Dinas Pariwisata memiliki keterbatasan jumlah pegawai. Terkait pendapatan, sistem yang diterapkan adalah mekanisme bagi hasil. Kalurahan Tepus mendapatkan alokasi sebesar 25% dari total realisasi penjualan tiket retribusi yang masuk ke kawasan wisata pantai. Dana ini kemudian ditransfer langsung ke rekening pendapatan asli kalurahan (PAKal), sehingga menjadi sumber pemasukan yang legal dan berkelanjutan bagi desa. Dalam pelaksanaannya, petugas pos retribusi dari kalurahan

diwajibkan menyetorkan hasil penjualan tiket maksimal dalam waktu 1 x 24 jam ke bendahara penerimaan di Dinas Pariwisata, sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana.

Sementara itu, seluruh biaya operasional yang berkaitan dengan pengelolaan Pos Retribusi—termasuk sewa tanah, pembangunan pos, kebutuhan listrik dan air, hingga pengadaan tiket fisik dan sistem pembayaran elektronik (MPos)—sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata dan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, untuk menjamin mutu layanan dan ketertiban dalam pelaksanaan tugas, Dinas Pariwisata juga secara aktif melakukan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), termasuk memberikan pelatihan kepada petugas pos retribusi dari Kalurahan Tepus.

Tabel 2. Jumlah Pengunjung Pos Retribusi Tepus Malam dan Realisasi PAD Tahun 2023-2024

No.	Tahun	Jumlah Pengunjung	Realisasi PAD
1	2023	85.058,00	808.051.000,00
2	2024	75.950,00	1.101.275.000,00

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, 2025

Berdasarkan uraian tersebut kolaborasi antara Dinas Pariwisata dengan Kalurahan Tepus dapat dipandang sebagai wujud sinergi yang saling menguatkan dalam pengelolaan destinasi pariwisata. Keberadaan petugas retribusi dari pihak kalurahan memberikan kontribusi penting dalam menjaga operasional Pos Retribusi agar dapat berjalan selama 24 jam penuh. Keberlanjutan operasional ini secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata, khususnya dalam peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan destinasi yang dikelola secara bersama. Bagi Kalurahan Tepus, kerja sama ini memberikan manfaat yang nyata dalam bentuk peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan (PAKAl). Pada tahun 2023, Kalurahan Tepus memperoleh pemasukan sebesar Rp202.012.750,00 dari hasil kerja sama tersebut. Jumlah ini mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2024, yakni mencapai Rp275.318.750,00. Jika dihitung, terjadi pertumbuhan sebesar kurang lebih 36,3% dalam kurun waktu satu tahun. Pendapatan ini tentunya memberikan ruang fiskal tambahan bagi kalurahan dalam mendukung berbagai program pembangunan serta memperkuat kesejahteraan masyarakat secara lebih merata dan berkelanjutan.

Kolaborasi ini menjadi contoh konkret bagaimana tata kelola pemerintahan daerah yang inklusif, efisien, dan partisipatif dapat diwujudkan melalui kemitraan antarpemangku kepentingan. Melalui pendekatan berbasis kolaborasi, pembangunan sektor pariwisata tidak hanya berfokus pada peningkatan angka kunjungan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal. Oleh karena itu, model kemitraan seperti ini patut untuk didorong dan direplikasi di wilayah lain yang memiliki potensi serupa guna menciptakan ekosistem pariwisata yang adil dan berkelanjutan.

b). Kolaborasi dalam Pengembangan Desa Wisata Tepus.

Dinas Pariwisata memiliki peran strategis dalam mendorong pengembangan Desa Wisata Tepus sebagai salah satu destinasi unggulan di Kabupaten Gunungkidul. Salah satu bentuk peran tersebut adalah dengan memberikan dukungan kebijakan dan regulasi yang memayungi kegiatan kepariwisataan berbasis masyarakat. hal ini tertuang melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 246/KPTS/2021 Tentang Penetapan Desa Wisata Tepus Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul sebagai desa wisata. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Dinas Pariwisata mendorong terciptanya desa wisata yang mandiri, kreatif, dan berkelanjutan melalui

berbagai program pembinaan, fasilitasi kelembagaan, serta pelatihan manajemen pariwisata yang melibatkan masyarakat lokal. Dengan kebijakan yang tepat sasaran, Desa Wisata Tepus mampu menggali potensi lokal seperti budaya, seni, dan kerajinan tangan untuk menarik minat wisatawan.

Dalam aspek promosi dan pemasaran, Dinas Pariwisata turut berperan aktif mempublikasikan potensi Desa Wisata Tepus ke tingkat regional maupun nasional. Melalui berbagai event seperti Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) dan promosi digital melalui media sosial dan website resmi, Dinas Pariwisata membantu memperluas jangkauan promosi sehingga mampu meningkatkan kunjungan wisatawan. Peran ini terbukti efektif dengan keberhasilan Desa Wisata Tepus masuk dalam 50 besar desa wisata terbaik nasional dan meraih Juara 2 Nasional dalam kategori Suvenir pada ADWI 2022, sebagai bentuk apresiasi, Dinas Pariwisata pernah menyelenggarakan Event Gunungkidul Tourism Fest (GTF) di Desa Wisata Tepus pada tahun 2023 yang lalu, selain itu berbagai konten media sosial juga menjadi produk kolaborasi dengan Desa Wisata Tepus.

Dinas Pariwisata juga berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana pendukung wisata di Desa Wisata Tepus. Hal ini mencakup penyediaan akses jalan, fasilitas umum, serta dukungan terhadap pengelolaan Pos Retribusi Pariwisata yang beroperasi 24 jam. Dalam pengelolaan pos retribusi ini, Dinas Pariwisata memberikan kewenangan kepada Kalurahan Tepus melalui regulasi resmi serta mendanai kebutuhan operasional seperti bangunan, listrik, air, dan sistem pembayaran elektronik. Kerja sama ini memperlihatkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah kalurahan dalam menciptakan lingkungan wisata yang tertib dan berkelanjutan.

Tidak kalah penting, Dinas Pariwisata juga berperan dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Desa Wisata Tepus. Melalui pelatihan dan pendampingan teknis kepada pelaku wisata, pengrajin lokal, dan petugas lapangan, desa ini mampu meningkatkan kualitas layanan dan produk wisata yang ditawarkan. Dengan demikian, Dinas Pariwisata tidak hanya menjadi fasilitator pengembangan fisik dan promosi, tetapi juga sebagai mitra pembangunan sumber daya manusia lokal yang menjadi tulang punggung keberhasilan desa wisata. Peran menyeluruh ini menunjukkan bahwa keberhasilan Desa Wisata Tepus tidak terlepas dari dukungan nyata dan berkelanjutan dari Dinas Pariwisata.

Kolaborasi yang terjadi telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Hal ini secara langsung berkaitan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata, yaitu meningkatnya belanja wisatawan selama berada di destinasi. Peningkatan kunjungan tidak hanya menunjukkan tingginya minat terhadap destinasi, tetapi juga menjadi bukti keberhasilan upaya bersama dalam memperkuat daya tarik pariwisata daerah. Seiring dengan semakin meningkatnya kualitas destinasi wisata, belanja yang dikeluarkan oleh wisatawan pun cenderung naik. Hal ini memberikan dampak ekonomi yang signifikan, terutama bagi masyarakat setempat. Peningkatan belanja wisatawan menciptakan peluang usaha baru, memperluas lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan khususnya bagi masyarakat Kalurahan Tepus.

Pembahasan

Analisis proses *collaborative governance* dalam kolaborasi antara Dinas Pariwisata dan Kalurahan Tepus berdasarkan kerangkayang meliputi *face-to-face dialogue*, *trust building*, *commitment to process*, dan *shared understanding*:

a) Face-to-Face Dialogue (Dialog Tatap Muka)

Proses kolaborasi antara Dinas Pariwisata dan Kalurahan Tepus dimulai dengan adanya komunikasi langsung melalui forum koordinasi dan sosialisasi kebijakan. Dialog tatap muka ini sangat penting terutama dalam menyepakati mekanisme pengelolaan Tempat Penarikan

Retribusi (TPR) serta dalam pembentukan dan pengembangan Desa Wisata Tepus. Proses ini terjadi dalam berbagai bentuk seperti rapat kerja, kunjungan lapangan, pelatihan bersama, hingga diskusi teknis antara pejabat Dinas Pariwisata, aparaturnya, dan pengelola desa wisata. Pertemuan-pertemuan tersebut memungkinkan para pemangku kepentingan menyampaikan aspirasi secara terbuka, memperjelas peran masing-masing, dan membentuk kesepahaman awal yang konkret dalam pelaksanaan kolaborasi dalam konteks kepariwisataan (Julianti & Frinaldi, 2025; Listyorini et al., 2021; Sado & Sahdan, 2025). Koordinasi menjadi kata kunci yang menjamin proses-proses kolaborasi berjalan dengan baik, sebagaimana diketahui bersama bahwa Dinas Pariwisata sebagai pengampu bidang pariwisata tentu tidak dapat berjalan sendiri, mengingat destinasi pariwisata, pelaku pariwisata, industri pariwisata kebanyakan berada di Kalurahan, sehingga menempatkan Kalurahan sebagai mitra kerja menjadikan program yang direncanakan tidak bersifat hirarkis, namun lebih egaliter (Bawole, 2021).

b) *Trust Building (Membangun Kepercayaan)*

Kepercayaan antara Dinas Pariwisata dan Kalurahan Tepus terbangun secara bertahap melalui pelaksanaan kolaborasi yang konsisten dan akuntabel dalam aspek teknis maupun administratif. Salah satu bentuk nyata dari kepercayaan tersebut adalah pelimpahan tugas pengelolaan Pos Retribusi malam hari kepada Kalurahan Tepus, yang didasarkan pada dasar hukum formal melalui Peraturan Bupati Nomor 317/KPTS/2024. Dalam pelaksanaannya, Kalurahan Tepus mampu menunjukkan tingkat akuntabilitas yang tinggi, khususnya dalam hal penyeteroran pendapatan retribusi secara tepat waktu dan transparan, yang memperkuat kredibilitasnya sebagai mitra pemerintah daerah (Asrori et al., 2020).

Relasi kepercayaan ini diperkuat melalui prinsip keterbukaan dalam pembagian hasil, di mana Kalurahan Tepus memperoleh 25% dari total pendapatan retribusi. Selain itu, dukungan dari Dinas Pariwisata juga diwujudkan melalui penyediaan sarana penunjang dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, yang semakin memperkuat kualitas kolaborasi. Ketika hasil kerja sama ini mulai memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat kalurahan dan mendukung peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, hubungan kemitraan antara kedua pihak berkembang menjadi lebih solid dan berkelanjutan (Rasethuntsa, 2021).

c) *Commitment to Process (Komitmen terhadap Proses)*

Baik Dinas Pariwisata maupun Kalurahan Tepus menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap proses kolaboratif ini. Komitmen tersebut terlihat dari adanya regulasi resmi yang menugaskan kalurahan secara legal, alokasi APBD untuk operasional retribusi, serta pelibatan aktif dalam pengembangan kapasitas pelaku wisata lokal. Kalurahan Tepus pun secara konsisten menjalankan tugas operasional sesuai jam yang ditetapkan (pukul 15.30 hingga 07.30) dan menjaga tata kelola keuangan sesuai prosedur. Komitmen terhadap proses juga tercermin dari pelaksanaan berbagai pelatihan, penyelenggaraan event seperti Gunungkidul Tourism Fest, serta keterlibatan aktif dalam promosi digital yang memerlukan kerja sama berkelanjutan antar pihak (Juniari & Mahyuni, 2020; Yunita & Suryono, 2019).

d) *Shared Understanding (Pemahaman Bersama)*

Kolaborasi antara Dinas Pariwisata dan Kalurahan Tepus lahir dari pemahaman yang sama bahwa pengembangan pariwisata tidak dapat berjalan sendiri, melainkan memerlukan sinergi antar lembaga. Keduanya menyadari bahwa keberhasilan sektor pariwisata tidak semata diukur dari jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga dari seberapa besar dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat lokal. Dalam konteks Kalurahan Tepus, yang memiliki kekayaan alam dan budaya sebagai potensi unggulan, pendekatan ini menjadi sangat relevan. Melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan destinasi menjadi kunci, sehingga pengembangan pariwisata benar-benar bersifat inklusif dan berkelanjutan (Maryani et al., 2022).

Kesamaan visi antara Dinas Pariwisata dan Kalurahan Tepus ini kemudian diwujudkan dalam bentuk kolaborasi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dan berdampak nyata. Pendekatan yang digunakan berfokus pada pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, dengan mendorong partisipasi aktif warga dalam menjaga, mengelola, dan mengembangkan destinasi yang ada. Selain meningkatkan kualitas layanan dan daya tarik destinasi, hal ini juga mendorong peningkatan belanja wisatawan yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi ini menjadi bukti nyata bahwa pembangunan pariwisata yang berpihak pada masyarakat dapat diwujudkan melalui kerja sama yang harmonis dan saling menguatkan (Alian et al., 2022).

KESIMPULAN

Kolaborasi antara Dinas Pariwisata dan Kalurahan Tepus memberikan dampak signifikan terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata, khususnya dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan belanja wisatawan. Melalui pengelolaan Pos Retribusi yang berjalan selama 24 jam, serta pengembangan Desa Wisata Tepus, kolaborasi ini tidak hanya memperkuat daya tarik destinasi wisata, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Pencapaian IKU terkait peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan peningkatan belanja wisatawan dapat dilihat dari meningkatnya Pendapatan Asli Kalurahan (PAKAl) yang mencapai Rp275.318.750 pada tahun 2024, meningkat sekitar 36,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sektor pariwisata berbasis kolaboratif dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, S., et al. (2021). Community empowerment in the context of sustainable tourism development in Surodadi Village. *JPPM (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 8(2), 131. <https://doi.org/10.21831/jppm.v8i2.39164>
- Alian, M. R., et al. (2022). Daya tarik wisata dan promosi Instagram yang memengaruhi keputusan berkunjung wisatawan di The Ranch Cisarua. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 10(2), 223. <https://doi.org/10.24843/jdepar.2022.v10.i02.p08>
- Asrori, A., et al. (2020). Determinants of financial performance of regional government revenue growth in Central Java Province, Indonesia. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i6.6632>
- Bandiyono, R. I. R. Y. B. M. A. (2021). The effect of work experience and OHS on tax office staff's performance. *Jurnal Manajemen*, 25(2), 255. <https://doi.org/10.24912/jm.v25i2.739>
- Bawole, P. (2021). Community based design for developing tourism area in the Village of Karangwuni, Wates District, Kuloprogo Regency – Yogyakarta Special Region. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 738(1), 12053. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/738/1/012053>
- Candranegara, I. M. W., et al. (2022). Hexahelix concept in the development of eco-tourism area in the Kelating traditional village eco-tourism area, Kerambitan District, Tabanan Regency. *IAPA Proceedings Conference*, 144. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2022.688>
- Dewi, N. K., et al. (2020). Performance analysis of Regional Civil Service Agency of the Rembang District. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 10(2), 439. <https://doi.org/10.26858/jiap.v10i2.15475>

- Fatimah, S., & Ayu, S. K. (2020). Rural tourism development: Institution, disaster and communication. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 466(1), 12023. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/466/1/012023>
- Julianti, J., & Frinaldi, A. (2025). Menggali potensi inovasi budaya di lingkungan organisasi publik. *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 351. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5371>
- Juniari, N. W., & Mahyuni, L. P. (2020). Implementasi corporate social responsibility (CSR) dalam mewujudkan pariwisata berbasis masyarakat berkelanjutan. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 4(1), 21. <https://doi.org/10.24912/jmie.v4i1.7449>
- Listyorini, H., et al. (2021). Merintis desa wisata, menguatkan kerjasama badan usaha milik desa dan kelompok sadar wisata. *Kacanegara: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 5(1). <https://doi.org/10.28989/kacanegara.v5i1.1076>
- Maryani, N., et al. (2022). Pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata pada destinasi wisata Stone Garden dan Gua Pawon. *Rahmatan Lil Alamin Journal of Community Services*, 2(1). <https://doi.org/10.20885/rla.vol2.iss1.art1>
- Muzdalifa, M., & Afifudin, A. (2023). Sport tourism as a catalyst for economic development in Sembalun Lawang Village, East Lombok. *Jurnal Pariwisata Nusantara (JUWITA)*, 2(1), 52. <https://doi.org/10.20414/juwita.v2i1.7062>
- Pangarso, A. W., et al. (2021). Increasing local economic values based on ecotourism in Semarang, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 780(1), 12044. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/780/1/012044>
- Rasethuntsa, B. C. (2021). The dimensions of tourism businesses- and associations collaborations to promote tourism development Lesotho. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 11(9). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v11-i9/10445>
- Sado, J. C., & Sahdan, G. (2025). Pengelolaan pariwisata di desa wisata Detusoko Barat Kabupaten Ende. *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 466. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5737>
- Sukarno, L. H., et al. (2023). Analisis hubungan modal sosial dengan partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata Embung Setumpeng, Kabupaten Karanganyar. *Journal of Tourism and Creativity*, 7(1), 40. <https://doi.org/10.19184/jtc.v7i1.38176>
- Suranto, S., et al. (2019). Community based tourism: Revitalization of villages through bamboo plantation conservation. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 7(2), 331. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7239>
- Utami, I. J. (2023). Pengembangan pariwisata berbasis budaya berdasarkan UU No. 10 Tahun 2009 di Provinsi Banten. *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi Administrasi Negara dan Hukum*, 1(1), 301. <https://doi.org/10.30656/senaskah.v1i1.242>
- Wilil, M., & Aedah, N. (2022). Partisipasi masyarakat dalam program pembangunan kampung di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(3), 155. <https://doi.org/10.31957/jkp.v5i3.2800>
- Yunita, W., & Suryono, Y. (2019). Community-based empowerment in Kaki Langit Market Tourist Village Bantul Yogyakarta. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i17.4636>
- Yusuf, G., et al. (2021). Pelatihan citation dan reference berbasis aplikasi dengan Mendeley dan EndNote bagi dosen di Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram. *Journal of Responsible Tourism*, 1(1), 9. <https://doi.org/10.47492/jrt.v1i1.987>